

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillite*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.¹⁵ Hal tersebut sama Menurut Peter Mahmud,¹⁶ bahwa kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah dan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepailitan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak

¹⁵ Zainal Asikin, 2002, *Op. Cit.*, hal 26-27.

¹⁶ Dalam Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan Cet. Ketiga*, Malang; UMM Pers, hal. 4.

mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.¹⁷

Sementara menurut Gunawan Widjaja, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁸

Sedangkan definisi Kepailitan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan kembali seseorang dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pailit*, online, diakses dari <http://kbbi.web.id/pailit> pada 7 Mei 2017.

¹⁸ Gunawan Widjaja. 2002. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.83

Pengertian pailit tersebut di atas dapat diartikan bahwa pailit dapat terjadi apabila seorang debitur tidak mampu untuk membayar kepada kreditur atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun pihak ketiga atas suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Adapun tujuan dari hukum kepailitan itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan Debitur yaitu yang memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara Kreditornya terhadap harta Debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. tanpa adanya Undang-Undang kepailitan, akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari Kreditor yang lemah.
- 2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur di antara para Kreditornya sesuai dengan asas pari passu membagi secara

¹⁹ Sutan Remy Sjadeini. 2009. ” *Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet Ke III. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 38.

proposional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor Konkuren berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut. didalam hukum indonesia asas pari passu di jamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.

- 3) Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitor pailit, Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangguhkan harta kekayaan yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads* 1847-52 jo. 1849-63) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang.²⁰

Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads* 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348) yang

²⁰ Rahayu hartini, 2012, *Op. Cit.*, hal 8.

berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Adapun dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
2. KUH Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
6. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Syarat Mengajukan Permohonan Pailit

Untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitor haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam peraturan perUndang-Undangan kepailitan yang berlaku dalam ketentuan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1) syarat pengajuan pailit yakni:

- a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua

kreditur. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursus creditorium*.²¹

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditur ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para krediturnya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro parte*. Adapun dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dan debitur yang bersangkutan dan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan. Bahwa disyaratkan debitur minimal yang mempunyai utang kepada dua orang kreditur.²²

b. Syarat adanya Utang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dirumuskan mengenai utang, yaitu:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dari Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

²¹ Sutan Remy Sjahdeny. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm.64.

²² Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.15.

Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum dari) debitur, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim pengadilan niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.²³

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena Putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu, dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.²⁴

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebelum akhirnya di cabut dan di ganti dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang No.4

²³ Sutan Remy Sjahdeny. *Op. Cit*, hlm. 68.

²⁴ Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.11.

Tahun 1998 seharusnya merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Dan beliau mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata. Dari hal ini dapat di simpulkan arti utang sama dengan pengertian kewajiban.²⁵

Dari uraian tersebut dapat ditafsirkan pula bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, menurut Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang. Kaertini Mulyadi menghubungkan perikatan yang di maksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jadi pengertian utang adalah setiap kewajiban Debitor kepada setiap Kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. kontroversi mengenai utang kemudian disatukan melalui dengan adanya Undang-Undang No37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana tertera dalam Pasal 1 butir (6) yakni:

“Utang adalah kewajiban yang di nyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uanag indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bilah tidak dipenuhi memberi hak kepada kredito untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor”.

²⁵ Sutan Remy Sjadeini. *Op. Cit*, hlm. 88.

Utang, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para Kreditor itu ada alasan-alasan untuk di dahulukan”.

Bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang di sebut dengan nama Kreditor. yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut di bagi secara:²⁶

- a. Parri Passu, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus di bagi secara bersama-sama di antara para Kreditor tersebut.
- b. Pro rata/ Proporsional, dengan pengertian bahwa sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing Kreditor terhadap utang Debitor secara keseluruhan.

Dalam suatu Perusahaan dikatakan pailit manakalah Perusahaan tersebut tidak sanggup atau mampu lagi membayar utang-utangnya. dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. dan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (5) peraturan kepailitan bilamana kepailitan itu

²⁶ Jono. *Op. Cit*, hlm. 3.

terbukti adanya peristiwa- peristiwa dan keadaan-keadaan berhenti membayar itu ada.

4. Pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan

Adapun para pihak yang dapat mengajukan pailit di atur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni:

- a. Debitor sendiri
- b. Satu atau lebih Kreditornya
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia dalam hal Debitor adalah bank
- e. Badan Pengawasan Pasar Modal dalam hal Debitornya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.
- f. Menteri Keuangan dalam hal Debitornya perusahaan Asuransi, Reasuransi dana pensiun atau BUMN yang bergerak dalam bidang publik.

Ketentuan di atas berlaku sebelum hadirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Terkait permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek sendiri hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (yang selanjutnya disebut Bapepam). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bursa efek, perusahaan, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang disebut Bapepam.

Namun, setelah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) disahkan, berdampak pada perubahan besar terhadap industri keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat pada aturan peralihan UU OJK dalam Pasal 55 yang menyatakan :

- 1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.²⁷
- 2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektro perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Dengan demikian fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK termasuk juga beralihnya wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bapepam-LK ke OJK.

Peralihan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berdampak juga secara langsung terhadap UUK dan PKPU dimana kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam ketentuan Pasal (2) sampai dengan ayat (5) UUK dan PKPU tersebut secara otomatis berpindah ke OJK kecuali untuk pengajuan permohonan kepailitan atas Bank yang masih dipegang oleh BI, hal ini karena amanat dari UUK dan PKPU itu sendiri

²⁷ Adanya lembaga OJK merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat

dalam Pasal 2 ayat (3) yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan (*macroprudential*).

Sehingga pada kepailitan terhadap debitor yang bergerak di bidang pasar modal, kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang awalnya hanya bisa dilakukan oleh Bapepam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU, yang berbunyi: “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.²⁸ Dengan hadirnya UU OJK, maka kewenangan pengajuan pailiti tersebut beralih pada OJK, dalam hal ini OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengaturan di bidang Pasar Modal.

5. Akibat Hukum Kepailitan

Kepailitan mengakibatkan Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “Hak Perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta Pailit”. pembekuaan hak perdata ini diberlakukan oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor

²⁸ Hal itu dikarenakan hanya Bapepam lah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.²⁹ hak Debitor untuk melakukan segala sesuatu tindakan hukum yang berkenaan dengan kekayaan sebelum pernyataan pailit harus dihormati.

Namun keadaan tersebut, akan berubah ketika Debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Dan terhitung sejak putusan pailit diucapkan maka kewenangan Debitor untuk mengurus harta kekayaan beralih kepada kurator. Semenjak pengadilan mengucapkan keputusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap Debitor, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang ia tidak membawa atau memberikan keuntungan atau manfaat bagi boedelnnya, dan sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.³⁰

Sebagai konsekuensi Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, maka semua perikatan antara Debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bilamana perikatan

²⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. Hukum Bisnis “Kepailitan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.30.

³⁰ Lihat pasal 19 dan 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Secara umum akibat pernyataan pailit yakni sebagai berikut:

- a) Kekayaan Debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta para pihak yang dinyatakan pailit;
- b) Kepailitan semata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. misalnya seorang tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pernyataan pailit diucapkan.
- d) Segala perikatan Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan hakim pengawas memimpin dan menguasai pelaksanaan jalannya kepailitan.³¹

Akibat Kepailitan Bagi Kreditor Pada dasarnya, mengenai kedudukan para Kreditor adalah sama Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*).

Asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang kepailitan dan peraturan perundangan lainnya. dengan demikian, asas paritas creditorum berlaku bagi para krediturnya konkuren saja.

Lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor seperatis untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk

³¹ Sutan Remy Sjahdeini . 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 255-256.

kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit. penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.³²

Akibat Kepailitan terhadap eksekusi atas kekayaan Debitor pailit dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan Debitor yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera di hentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.

Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegasakan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagaian kekayaan Debitor apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, kemudian pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai maka pelaksanaan tersebut harus dihentikan.

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37

³² Lihat pasal 56 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tahun 2004, apabila hari pelelangan untuk memenuhi Putusan Hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk harta pailit.

B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Efek

Perusahaan efek diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pada pasal 30 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa perusahaan efek merupakan perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Perusahaan Efek lebih dikenal sebagai Perusahaan Sekuritas (*Securities Company*). Melihat besarnya ruang lingkup kegiatan Perusahaan Efek itu, maka diharuskan bagi Perusahaan Efek untuk mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya. Dengan adanya *Securities Company*, maka potensi penyerapan dana emisi akan menjadi semakin kuat, keaktifan perdagangan di pasar akan meningkat.³³

Pada umumnya Perusahaan Efek dilihat dari sudut kepemilikannya dapat dibedakan atas:³⁴

- a) Perusahaan Efek Nasional, yaitu Perusahaan Efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia

³³ Rusdin, 2006, *Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta, hal. 48.

³⁴ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 19.

- b) Perusahaan Efek Patungan, yaitu Perusahaan Efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang keuangan.

Selanjutnya, dalam pasal 32 Ayat (1) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara republik indonesia dan atau berbadan hukum atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dan badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing atau badan hukum asing.

Bila dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju pasar modalnya, perusahaan efek merupakan *leading agent* dalam pengembangan jasa dan produk investasi eceran. Metode yang dipakai negara-negara lain sangat bervariasi, tetapi yang pasti, diperlukan dana investasi yang cukup besar di bidang pemasaran. Untuk itu diperlukan tenaga yang handal dan profesional.

Mengenai permodalan perusahaan efek diatur dalam pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, sebagai berikut:

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan efek, adalah sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Efek (*underwriter*)

Penjamin Emisi Efek (PEE) adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli

sisia efek yang tidak terjual.³⁵ Izin usaha sebagai PEE berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian perusahaan efek yang telah berizin usaha penjamin emisi efek dapat juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Tetapi perusahaan efek yang berizin usaha perantara pedagang efek tidak otomatis dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

Penjamin Emisi Efek biasa disebut juga sebagai *Underwriter*. Adapun peran dari Penjamin Emisi adalah peran dari Perusahaan Efek untuk melakukan Penjaminan Emisi (*Underwriting*) bagi Emiten atau perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari para investor di masyarakat. Kesanggupan Penjamin Emisi Efek itu mengandung resiko, maka sebelum menyatakan kesanggupannya, Penjamin Emisi haruslah mempelajari dulu kemampuan Emiten, dan juga memperkirakan kemampuan Investor yang akan tertarik pada saham atau obligasi yang dijaminakan tersebut.³⁶

Secara garis besar peran dan fungsi penjamin emisi dalam *proses go public* adalah sebagai berikut:³⁷

³⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

³⁶ Rusdin, *Op. Cip.*, hal. 37.

³⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal.145

- Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka *go public* penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan pelaksanaan serta pengendalian proses emmisi, mulai dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjualkan efek di pasar perdana.
- Menjamin efek yang diterbitkan emiten. Dalam hal ini penjamin emisi bertanggungjawab atas keberhasilan penjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam duatu penjamin akan terkandung suatu risiko, untuk itu penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi.
- Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik. Sehingga dilakukan pendisainan dan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu.

Undang-Undang Pasar Modal Pasal 39 bahwa penjamin emisi sebagai dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Secara teoritis, ada beberapa macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal seperti:³⁸

- a) *Full Commitment* (Kesanggupan Penuh), yakni Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengambil atau

³⁸ *Ibid*, hal. 145.

membeli sisa Efek yang tidak terjual.

- b) *Best Effort Commitment* (Kesanggupan Terbaik), yakni Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas sisa Efek yang terjual, tetapi Penjamin Emisi Efek akan berusaha sebaik-baiknya agar Efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
- c) *Standby Commitment* (Kesanggupan Siaga), yakni Penjamin Emisi Efek berkomitmen agar saham yang tidak terjual di dalam pasar perdana dapat beli oleh Penjamin Emisi Efek pada harga tertentu.
- d) *All or None Commitment* (Kesanggupan Semua atau Tidak Sama Sekali) yakni Penjamin Emisi Efek akan berusaha menjual semua Efek, agar laku semuanya, tetapi apabila Efek tersebut tidak laku semuanya maka transaksi dengan investor yang ada akan dibatalkan. Jadi semua Efek akan dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa perusahaan membutuhkan modal di dalam jumlah tertentu. Apabila jumlah yang ditargetkan tersebut tidak tercapai, maka investasi perusahaan yang bersangkutan dirasakan kurang bermanfaat. Oleh karena itu, lebih baik dibatalkan seluruhnya. Modifikasi dari komitmen ini adalah komitmen “paling sedikit-paling banyak (minimum-

maksimum)”. Penjamin Emisi Efek harus berusaha untuk mencapai batas penjualan minimum yang ditentukan, apabila batas minimum tersebut telah tercapai, maka emisi dapat diteruskan. Dengan demikian permohonan pembelian akan menjadi kenyataan apabila batas minimum dapat tercapai. Saat ini lazim di dalam proses Penjaminan Emisi Efek dipersyaratkan adanya Green Shoe Option, yakni adalah sebuah klausul perjanjian penjaminan yang memperbolehkan sindikasi untuk membeli lebih banyak saham ketika dijual di dalam waktu yang sangat singkat (Short Sale).

2. Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*)

Pengertian Perantara Pedagang Efek (PEE) diatur dalam Pasal 1 Angka 18 UU Pasar Modal, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. PEE berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh karena itu PEE sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pasar modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya (*my word is my bond*-motto dalam industri pasar modal).

3. Manajer Investasi (*investment Manager*)

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang

terorganisasi) untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Manajer Investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama-sama dengan kegiatan lainnya yaitu penjamin emisi dan perantara efek. Imbalannya dihitung dari persentase tertentu dari nilai dana yang dikelolanya.

Berdasarkan ketiga kegiatan usaha Perusahaan Efek yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran, tugas dan fungsi Perusahaan Efek meliputi banyak aspek dalam Pasar Modal Indonesia. Peran Perusahaan Efek tersebut secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sebagai Pendukung eksistensi Pasar Modal, dalam hal perputaran dana dan informasi
- b. Mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari Pasar Modal dan sebagai unit usaha.
- c. Meningkatkan kegiatan berinvestasi di Bidang Pasar Modal untuk meningkatkan perekonomian nasional.

³⁹ Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁴⁰ Keputusan Ketua Bapepam Tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Nomor V.D.1, KEP no. Kep-27/PM/1996, butir 1.

Sementara fungsi Perusahaan Efek secara umum adalah sebagai berikut.⁴¹

- a) Sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara investor dengan investor lainnya dan investor dengan Emiten.
- b) Sebagai ujung tombak Pasar Modal dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem

⁴¹ *Ibid*

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.⁴²

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;

⁴² Zaidatul Amina, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 8.

- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.⁴³

⁴³ Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (credit testing); dan

- 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - 5) Pemeriksaan bank.

3. Peran dan Fungsi OJK terhadap Perusahaan Efek

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU, yaitu: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Tugas-tugas di atas sebelum sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia. Namun pasca berlakunya UU OJK, tepatnya sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU OJK.

- 1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.⁴⁴
- 2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektro perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Dengan demikian fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK termasuk juga beralihnya wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bapepam-LK ke OJK.

⁴⁴ Adanya lembaga OJK merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat

Peralihan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berdampak juga secara langsung terhadap UUK dan PKPU dimana kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”), syarat dan putusan pailit adalah: *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Sehingga, pada prinsipnya permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor atau debitor sendiri apabila memiliki dua kreditor dengan syarat satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selain itu, UUK mengatur syarat khusus pengajuan permohonan pailit terhadap Debitor-debitor tertentu sebagaimana Pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 ayat (3) UUK: *“Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”*
- Pasal 2 ayat (4) UUK: *“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”*

- Pasal 2 ayat (5) UUK: *Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) UU OJK hanya Badan Pengawas Pasar Modal yang mengalihkan seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor Pasar Modal kepada OJK, sedangkan terhadap Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masih menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu dengan adanya OJK, otomatis telah mengubah prosedur permohonan pailit terbatas pada perusahaan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dahulu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan tersebut beralih ke OJK. Mengacu pada OJK didirikan untuk mengganti peran Bapepam-LK yang disimpulkan sudah tidak ada lagi lembaga Bapepam-LK.

Sedangkan prosedur permohonan pailit terhadap Bank tetap diajukan oleh Bank Indonesia dan untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, tetap diajukan oleh Menteri Keuangan.

D. Kompetensi dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga

Kompetensi pada Pengadilan Niaga diantaranya ada Kompetensi Relatif dan Kompetensi absolute yaitu:

1. Kompetensi Relatif

Mengenai Kompetensi Relatif merupakan Kewenangan atau Kekuasaan mengadili antara Pengadilan Niaga berkedudukan sama di Pengadilan Negeri, hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit di putus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Kemudian, apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor tinggal. apabila Debitor yang tidak berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan Profesi atau usahannya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya.

2. Kompetensi Absolut

Mengenai Kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa, mengadili dan memutus perkara antar badan peradilan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada dibawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit. selain itu dalam ketentuan pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mengenai Ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga di indonesia tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja. Tetapi Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa komersial lainnya seperti sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut yaitu:

1. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio pauliana* dan prosedur *renvoi* tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak lihat Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Perkara Hak Kekayaan Intelektual di antaranya meliputi:

- a. Desain Industri (lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
- b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
- c. Paten (lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- d. Merek (lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- e. Hak Cipta (lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

3. Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di antaranya meliputi:

- a. Sengketa dalam proses likuidasi.
- b. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Jadi, Kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili, memutuskan perkara permohonan pailit dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. dalam perkembangnya hingga saat ini, Peradilan Niaga juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual dan juga perkara Lembaga Penjamain Simpanan.

Hukum acara Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dan Putusan Pengadilan Niaga bersifat serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang Kepailitan.

Problematika lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Peradilan Niaga dalam sengketa kepailitan adalah apakah kompetensi absolut tersebut hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pailit dan PKPU, kemudian bagaimana dengan sengketa Kepailitan, misalnya *actio Pauliana* kepailitan, sengketa Perburuhan dalam Perusahaan yang Pailit, dan bantahan terhadap sita jaminan atas harta kekayaan Debitor sebelum dinyatakan pailit. dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dikatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Adapun yang dimaksud hal-hal lain dalam penjelasan pasal tersebut *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam

perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan terbatas dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.⁴⁵



⁴⁵ Hadi shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. Hlm.103-104